



**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN
KETENAGAKERJAAN**

RENCANA KERJA 2026



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026 ini adalah kewajiban dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja ini merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang akan digunakan sebagai bahan penyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Renja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026 berisikan kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang akan dilakukan oleh Dinas selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2026. Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2023 – 2026 dan bahagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Renja ini sudah diupayakan dengan maksimal sesuai dengan potensi, sumberdaya dan harapan, tapi tetap disadari masih ada kekurangan. Untuk kesempurnaan Renja ini diharapkan saran dan masukan dari semua pihak.

Lubuk Basung, Agustus 2025

**Kepala Dinas Perindagnaker
Kabupaten Agam**

RIO EKA PUTRA, S.IP, M.Si

Pembina

NIP. 19870122 200701 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan amanah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja tahunan yang disingkat dengan RENJA. Renja OPD adalah merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan salah satu bahan dasar untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Renja OPD ini memuat kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju dari kegiatan yang dilakukan oleh OPD.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan (PERINDAGNAKER) Kabupaten Agam yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Agam No. 82 Tahun 2022, adalah salah satu perangkat kerja daerah Kabupaten Agam yang ditugaskan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam di bidang Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan. Penyusunan Renja Tahun 2025 sebagai salah satu bentuk tanggung jawab melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Renja Tahun 2025 ini adalah merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2023 – 2026 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor);
9. Renstra Dinas Perindagnaker Kabupaten Agam yang telah ditetapkan;

10. Regulasi lainnya terkait SOTK, Kewenangan dan Tupoksi OPD

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan tata urutan penyusunan dokumen perencanaan, maka penyusunan Renja OPD ini dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu 1 tahun. Renja OPD ini untuk selanjutnya adalah pedoman dalam penetapan prioritas dalam penentuan program dan kegiatan; lokasi kegiatan, indikator kinerja; kelompok sasaran; dan pagu indikatif dan prakiraan maju untuk kesinambungan penganggaran pembangunan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja OPD ini adalah untuk menjabarkan dan implementasi dari Renstra OPD, RPJMD sector ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun lalu, dengan demikian akan terdapat keterkaitan dan kesinambungan penetapan anggaran pembangunan sector ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan setiap tahunnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut ;

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan Renja
- 3.2 Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

- 4.1. Rencana Kerja Tahun 2026

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN 2023

2.1. EVALUASI RENJA TAHUN 2023

Sesuai dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 432.A Tahun 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan mendapat alokasi belanja sebesar Rp. 6.984.189.159,-. Seluruh Belanja tersebut terakumulasi ke dalam 10 program dengan 17 kegiatan di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan yaitu ;

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (4 kegiatan, 12 sub kegiatan)
- Program Pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja (2 kegiatan, 2 sub kegiatan)
- Program Penempatan Tenaga Kerja (2 kegiatan, 2 sub kegiatan)
- Program Hubungan Industrial (2 kegiatan, 3 sub kegiatan)
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (2 kegiatan, 2 sub kegiatan)
- Program Pengembangan Eksport (1 kegiatan, 1 sub kegiatan))
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (1 kegiatan, 1 sub kegiatan)
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (1 kegiatan, 1 sub kegiatan)
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (1 kegiatan, 2 sub kegiatan)
- Program Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota (1 kegiatan, 1 sub kegiatan)

Sampai akhir Tahun Anggaran 2023, secara keseluruhan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan target perencanaannya, hal ini terlihat dari Tabel 2.1 berikut :

1	0	0	2	4	-Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	3 paket	100
1	1	1	2	2	-Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100	5 laporan	5 laporan	100
1	0	1	1	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	1	1	6	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	3 laporan	100
1	0	1	1	1	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	3 laporan	100
1	0	1	1	1	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	5 laporan	5 laporan	100
1	1	1	6	4	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	5 laporan	5 laporan	100
1	0	1	1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja SKPD	86	86	86	86	86	86	86	86	86
1	0	1	1	1	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	0	100
1	1	1	7	4	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100	3 unit	2 unit	100
1	0	1	1	1	-Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100	3 unit	2 unit	100
1	0	1	1	0	-Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100	75 unit	25 unit	100
1	1	1	8	4	-Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100	75 unit	25 unit	100
1	0	1	1	0	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	5	-	-	-	-	-	5	5	100
1	1	1	8	5	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	5	-	-	-	-	-	5	5	100
1	0	1	1	0	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarakan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta PBK yang dimungkinkan Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada	18 orang 96 orang	-	-	210 orang 120 orang	100	100	18 orang 96 orang	184 orang	100

1	0	1	1	0	Program perencanaan dan pembangunan Industri	Peningkatan laju jumlah IKM dan nilai produksi	2					1	2	100
1	1	5			Industri	Jumlah peningkatan IKM								
1	0	1	0	0	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan Industri									
1	1	5	5		Kabupaten/Kota									
1	0	1	0	0	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	5 dokumen			5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100
1	1	6	2		Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	7 dokumen			7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100
1	0	1	0	3	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Persentase ketersediaan data industri	75	-					16 IKM	100
1	0	1	1	7	Program Pengelolaan sistem informasi Industri nasional	Sosialisasi SIINas terhadap pelaku UMKM	16 UMKM	-					16	100
1	0	1	0	0	Penyediaan informasi Industri untuk Industri untk TUI,IPUI, TUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisa industri melalui SIINas	16	-					16	100
1	0	1	0	2	Diseminasi publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten/Kota melalui SIINas									

Lubuk Basung, Agustus 2025
Kepala Dinas Perindagnaker


RIO EKA PUTRA, S.I.P. M.Si
Pembina
NIP. 19870122 200701 1 001

2.2. Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan dalam aspek Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Agam, dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja utama (IKU), sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

No	Indikator	SPM/ Standar nasiona l	IKK/ IKU	Target Renstra		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase jumlah koperasi yang aktif	217 219		5	5	2	2	
2	Persentase jumlah koperasi yang sehat			135	136	135	136	
3	Persentase jumlah koperasi yang berprestasi			3	3	3	-	
4	Persentase penumbuhan koperasi baru	217 219		5	5	1	2	Penerbitan Badan hukum wewenang Pusat
5	Rasio UMKM yang ikut pameran			200/15 .502= 1,29	200/15 .811 = 1,26	150/15 .502= 0,96	-	
6	Persentase UMKM yang mendapatkan pelatihan	15.202 15.507		0,39 (60)	0,39 (60)	0,39 (60)	0,45 (70)	
7	Jumlah UMKM yang menjadi mitra kerja dengan BUMN			20	20		35	
8	Persentase pasar yang memenuhi standar	36		5	5	3	5	
9	Persentase kios/los yang layak pakai	36		1	1	3	5	
11	Jumlah usaha IKM yang memiliki kemasan jual yang representatif					25		
12	Persentase pertumbuhan usaha IKM	7.361						
13	Tidak							

	terjadinya kelangkaan produk barang dan jasa pada 16 kecamatan							
14	Terlaksananya standarisasi alat UTP pada 16 kecamatan			2.634	2.644	470	119	
1	Persentase koperasi aktif	217 219		80,0	82,2	93,5	74	
2	Usaha Mikro dan kecil			14.940	15.090	15.212	15.507	
2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB			13,38	13,58	11,07		
3	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri			11,53	11,73			
4	Pertumbuhan industri			5,2	5,4	6,79		

2.3. Isu Isu penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD

Isu strategis adalah permasalahan utama yang dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu lima tahun mendatang . berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam pembangunan perindustrian, perdagangan, dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Perindustrian

- Masih rendahnya mutu dan daya saing produk home industri Kabupaten Agam
- Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk
- Terbatasnya penerapan teknologi serta pengetahuan tentang bahan baku produk
- Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standarisasi dan sertifikasi produk.

2. Perdagangan dan Pasar

1. Stabilitas harga dilakukan melalui penetrasi pasar :

Upaya yang dilakukan adalah : melakukan Operasi Pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan menghimpun ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya dan memastikan kesiapan daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional)

2. Pemilik Alat UTTP (Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya) belum mendapat pelayanan Tera dan Tera Ulang secara maksimal.

Upaya yang dilakukan : (Sesuai Permendag no 115 tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal, telah diterimanya SK pegawai berhak pada UPT Metrologi Legal Dinas Perindagkop UKM dari Dirmet Kemendag RI atas nama Nofriadi, ST dan Cap Tera-Tera Ulang, sehingga UPT. UML Kabupaten Agam sudah dapat beroperasi secara mandiri dan menjadi salah satu sumber PAD dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang alat UTTP.).

3. Harga produk pertanian anjlok saat panen raya.

Upaya yang akan dilakukan : membangun sarana dan prasarana perdagangan yang memadai untuk menampung hasil pertanian seperti jagung memerlukan Resi Gudang, sedangkan produk pertanian yang mudah rusak (perishable) seperti (cabe, tomat dll) perlu disimpan dalam gudang pendingin/ Cold Storage agar laku dijual kembali disaat harga normal).

4. Produk unggulan masih perlu mendapatkan pendampingan agar lebih berdaya saing di pasaran, termasuk melakukan promosi dan kerjasama dengan agen wisata dan marketplace besar seperti tokopedia, shopee dan lain sebagainya)

5. Ditemukan bahan pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya di pasar.

Upaya yang akan dilakukan: melakukan pelatihan dan bimbingan secara continue oleh BBPOM terhadap OPD teknis, pelaku usaha dan pengurus pasar se Kabupaten Agam agar memiliki pengetahuan tentang keamanan pangan.

6. Rendahnya persentase pasar rakyat yang dikelola secara profesional dan memenuhi standar manajemen pengelolaan yang baik
7. Sarana dan Prasarana pasar rakyat yang belum kompetitif menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2015
8. Belum terintegrasinya rencana revitalisasi pasar rakyat dengan rencana pembangunan sektor-sektor prioritas daerah lainnya.

3. Koperasi dan UKM

1. Penguatan Kelembangan Pengawasan Koperasi dan UMKM
2. Peningkatan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM
3. Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM
4. Kebijakan Ekonomi Daerah
5. Belum maksimalnya pengawasan koperasi dan UKM
6. Masih sulitnya akses pembiayaan bagi koperasi dan UKM
7. Produktivitas dan daya saing UMKM kita masih rendah

2.3. Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat

- a. Usulan kegiatan masyarakat diserap melalui Musrenbang Tahun 2023 tidak ada
- b. Usulan kegiatan yang diserap melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD antara lain :
 1. Bantuan Sarana Prasarana UMKM (pedagang)
 2. Bantuan mesin jahit untuk kelompok IKM.
 3. Bantuan alat usaha kuliner dan kerupuk ubi
 4. Bantuan alat usaha tambua dan perabot
 5. Bantuan cangkul dan gerobak sorong untuk usaha batu bata

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN

Sesuai dengan Misi II dan misi IV dari RPJMD, tujuan dari Renja OPD adalah Meningkatkan Produksi Usaha Industri Pengolahan dan Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.

3.2. SASARAN RENJA OPD

Sasaran Renja OPD adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kebijakan daerah dalam mendukung pengembangan industri
3. Meningkatnya akses pemasaran produk
4. Meningkatnya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
5. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja

Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP perangkat daerah berdasarkan penilaian Inspektorat
2. Laju pertumbuhan industri kecil
3. Persentase peningkatan pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan akses
4. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
5. Tingkat produktifitas tenaga kerja

Analisis target pelayanan OPD untuk tahun 2025 seperti terlihat dalam tabel berikut :

**Proyeksi Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan
dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target
-1	-2	-3	-4	-5
Misi II : Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata				
1	Meningkatnya produksi industri pengolahan	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	B (62)
		Meningkatnya kebijakan daerah dalam mendukung pengembangan industri	Laju pertumbuhan industri kecil	1
		Meningkatnya akses pemasaran produk	Persentase peningkatan pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan akses	2,63
		Meningkatnya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	13,20
Misi IV : Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter				
	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Tingkat produktifitas tenaga kerja	6,2

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan untuk rencana kerja tahun 2026 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 2. Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
 - 1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja**
 - 2.1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**
 1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- 3 Program Penempatan Tenaga Kerja**
 - 3.1 Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota**
 1. Perluasan Kesempatan Kerja
 - 3.2 Pengelolaan Informasi Pasar kerja**
 1. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
- 4. Program Hubungan Industrial**
 - 4.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan
 - 4.2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**
 1. Pencegahan Perselisihan hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripatrit Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

6. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

6.1 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang

1. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

7.1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

7.2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

8.1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/Kota

1. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

9. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

9.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa era, Tera Ulang

10. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

10.1 Peyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten/Kota

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

11. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

11.1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIINas

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERINDAGNAKER

4.1. RENCANA KERJA TAHUN 2026

Untuk Tahun 2026, Dinas Perindagnaker merencanakan alokasi belanja sebesar Rp. 11.941.742.093,30,- yang terakumulasi ke dalam 11 program dengan 17 kegiatan berdasarkan Permendagri No. 90 tahun 2019 yaitu ;

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (5 kegiatan, 12 sub kegiatan)
- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja (1 kegiatan, 1 sub kegiatan)
- Program Penempatan Tenaga Kerja (2 kegiatan, 2 sub kegiatan)
- Program Hubungan Industrial (2 kegiatan, 4 sub kegiatan)
- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (1 kegiatan, 1 sub kegiatan)
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (2 Kegiatan, 2 sub kegiatan)
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (1 kegiatan, 1 sub kegiatan)
- Program Pengembangan Ekspor (1 kegiatan, 2 sub kegiatan)
- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (1 kegiatan, 1 sub kegiatan)
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (1 kegiatan, 4 sub kegiatan)
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (1 kegiatan, 1 sub kegiatan)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / SUB URUSAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	PENCAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELompok Sasaran	PENCAPAIAN MAJU BENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENDANGUNGAN DAN KETAWAKMUKERJAAN
							TARGETI 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
1	2	Pelaksanaan antar Kerja di Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Pokokan Kelempukan Kerja	-	-	-	85 Orang	92.732.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	13	Pencari Kerja	16	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PENDANGUNGAN DAN KETAWAKMUKERJAAN			
2.07.04.2.01.0005		Peluasan Kelempukan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Pokokan Kelempukan Kerja	-	-	85 Orang	92.732.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	12	13	Pencari Kerja	16	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PENDANGUNGAN DAN KETAWAKMUKERJAAN			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANJUK PERIODE REKORD RESTRIBRA OPD	REALISASI CAPAIAN REKORD RESTRIBRA TAHUN 2024	PRARAKORAN CAPAIAN TARGET REKORD RESTRIBRA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENUNJANG											
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							TARGET 2023	PAJU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA UMUM (DAU)	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET TAHUN 2027	PAJU INDIKATOR (Rp)	DAAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETERBAKARAN		
1	2		Jumlah LKS Tiyarak yang Dikhe				1 Lembang	3.485.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melakukan in pembangu an dan menin gkatkan kegiatan kegiatan yang kegiatan yang berkeadilan, mendukung kegiatan Berdoga dan, mengpa nfaatkan Indikator Indikator serta mengemb ngkan agronomik Indikator di serta produk mahlif pemer aktif keprotek.	13	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Setak, Berp enghasilan - Terampil dan Berdoga Saling Penunuran Indikator Tiyarak ke mishkan, P mengemb ngkan dan Deseran Terampil	Partesahan dan Tenaga Kerja			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETERBAKARAN
		Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terampil]	Persentase Perumahan yang layak huni sahil kerja yang giprtek, LKS Bilante, Struktur Skala Upah dan berditer BPJIS Kelayakan]]	11,95	75	7,29	8,42	361.463.100,00	-	-	-	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Setak, Berp enghasilan - Terampil dan Berdoga Saling Penunuran Indikator Tiyarak ke mishkan, P mengemb ngkan dan Deseran Terampil	Partesahan dan Tenaga Kerja			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETERBAKARAN
								361.463.100,00	-	-	-	-					0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETERBAKARAN
	2017.05.2.02.0016	Pengembangan Pelaksanaan Layanan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesehatan Pekerja	Terdakarnya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesehatan Pekerja				4133 Orang	324.445.500,00	-	DAAN BAGI HASIL (DBH)	Melakukan in pembangu an dan menin gkatkan kegiatan kegiatan yang kegiatan yang berkeadilan, mendukung kegiatan Berdoga dan, mengpa nfaatkan Indikator Indikator serta mengemb ngkan agronomik Indikator di serta produk mahlif pemer aktif keprotek.	13	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Setak, Berp enghasilan - Terampil dan Berdoga Saling Penunuran Indikator Tiyarak ke mishkan, P mengemb ngkan dan Deseran Terampil	Partesahan dan Tenaga Kerja			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETERBAKARAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PELHAYUAN						7.872.553.917,20									2.542.197.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM : KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODISASI RENCANA TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2024	PRAKARANYA TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKAI PENDANAAN										PRAKARANYA MALU BENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANANGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	3.30.03.2.02.0001	Perbaikan dan Peningkatan Penyeleksi Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kopda Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				10 Dokumen	5.396.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Proses Bisnis	-		8.090.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN		
3.	3.30.04	PROGRAM STRATEGIS PENGEMBANGAN KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	terlambatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar/dagang				5 pasar	186.717.499,30	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Proses Bisnis	-		133.590.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN		
	3.30.04.2.01	Memenuhi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	jumlah fasilitas pasar murah dan operasi pasar				2 kali	186.717.499,30	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Proses Bisnis	-		133.590.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN		
	3.30.04.2.01.10003	Peningkatan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pencapaian Stock atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	186.717.499,30	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Proses Bisnis	-		133.590.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG OUTPUT / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEMERDEKAAN SUB KEGIATAN	TARGET PENCAPAIAN REVISI OPD	REALISASI CAPAIAN REVISI OPD TAHUN 2026	PANGARAN TARGET REVISI OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKAI PENYAMAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKARYA MAJU BERKAMA				
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	3.30.06	PROGRAM SIPAMUNDIKAN DAN KONSUMEN	Persentase Alat UHTF yang berfungsi Tersebut	-	-	24 Persen	55.085.600,00							-	81.187.280,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Hentog Legal, Bempu Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Tes, Tinjauan yang tidak di Tera/ Tera Ulang	-	-	500 Unit	55.085.600,00							-	81.187.280,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETERANGANERJAAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Hentog Legal, Bempu Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Tes, Tinjauan yang tidak di Tera/ Tera Ulang	-	-	500 Unit	55.085.600,00							-	81.187.280,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETERANGANERJAAN
1.	3.31.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIKAWAN PERINDUSTRIAN	Persentase Lagi Jumlah Kil dan Rata Produk	-	-	2 Persen	4.178.580.738,00							-	1.175.408.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIKAWAN PERINDUSTRIAN	Persentase Lagi Jumlah Kil dan Rata Produk	-	-	2 Persen	4.178.580.738,00							-	1.175.408.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Hentog Legal, Bempu Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Tes, Tinjauan yang tidak di Tera/ Tera Ulang	-	-	500 Unit	55.085.600,00							-	81.187.280,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETERANGANERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KELOMPOK SUB KEGIATAN	TARGET PENCAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2026	PERAGAIAN TARGET RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KUALITAS DAN KEBERANGKIPAN					KELOMPOK SASARAN	PERAGAIAN RENCANA TAHUN 2027			
							5 Dokumen	PAU INDIKATOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL DAERAH		TARGET	PAU INDIKATOR (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kecerdasan, Sertifikasi, dan Pembinaan/Perencanaan Sarana dan Prasarana Industri				4 Dokumen	4.330.085.536,00		DANA ALOKASI ULIYAH (DAU)	Meningkatkan dan meningkatkan industrialisasi keberhasilan daya dalam industrialisasi meningkatkan kegiatan	Meningkatkan dan meningkatkan industrialisasi keberhasilan daya dalam industrialisasi meningkatkan kegiatan			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETERAWAHLAN
Kordinasi, Sinergi, dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Industri dari Peran Serta Masyarakat																
	3.31.02.2.01.00/05		Jumlah Dokumen Hasil Kecerdasan, Sertifikasi, dan Pembinaan/Perencanaan Materi dan Peran Serta Masyarakat				5 Dokumen	360.167.300,00		DANA ALOKASI ULIYAH (DAU)	Meningkatkan dan meningkatkan industrialisasi keberhasilan daya dalam industrialisasi meningkatkan kegiatan	Meningkatkan dan meningkatkan industrialisasi keberhasilan daya dalam industrialisasi meningkatkan kegiatan			600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETERAWAHLAN
2.	3.31.94	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri				60 Person	27.713.482,00			Meningkatkan dan meningkatkan industrialisasi keberhasilan daya dalam industrialisasi meningkatkan kegiatan	Meningkatkan dan meningkatkan industrialisasi keberhasilan daya dalam industrialisasi meningkatkan kegiatan			70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETERAWAHLAN
	3.31.04.2.01	Perencanaan informasi industri untuk mendukung kegiatan industri di Kawasan Industri Kebudayaan/Kode	Jumlah KKI Yang Terdaftar Data Statistik				40 Orang	27.713.482,00			Meningkatkan dan meningkatkan industrialisasi keberhasilan daya dalam industrialisasi meningkatkan kegiatan	Meningkatkan dan meningkatkan industrialisasi keberhasilan daya dalam industrialisasi meningkatkan kegiatan			70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETERAWAHLAN

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2026 merupakan acuan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2026, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2026, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja Tahunan ini memuat strategi dan kebijakan dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan, dengan mendasari pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan :

1. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan.
3. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10).
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi.

Pada akhirnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2026 ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang baik dan akuntabel.

Kepala Dinas



Rio Eka Putra, S.IP,M.Si
Pembina
NIP.19870122 200701 1001